

## RASIONALITAS ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT NELAYAN PADA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN MAJENE

### *RATIONALITY OF THE POLITICAL ORIENTATION OF FISHERMEN COMMUNITIES IN GENERAL ELECTION IN MAJENE REGENCY*

*Irwansyah Mansyur<sup>1</sup>, Gustiana Kambo\*<sup>2</sup>, A. M. Rusli<sup>3</sup>*

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

<sup>3</sup>Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

\*Surel Korespondensi: [gustianakambo@yahoo.com](mailto:gustianakambo@yahoo.com)

Tanggal Penyerahan: 19-11-2018

Tanggal Publikasi: 14-01-2019

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis orientasi politik masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Majene yang dikaitkan pula dengan rasionalitas mereka dalam memilih pada pemilihan umum. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analisis. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka. Data dianalisis menggunakan teori orientasi politik, teori pilihan rasional Coleman dan konsep rasionalitas lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara orientasi kognitif, pengetahuan nelayan tentang pemilihan umum masih sangatlah rendah. Mereka dalam mengambil keputusan politik tidaklah mempertimbangkan program dan visi misi partai politik melainkan hanya pertimbangan sosok figure saja yang mereka kenal dan sukai. Aspek orientasi afektif, nelayan tidak merasakan hasil pemilu yang terdahulu dapat bermanfaat bagi kehidupannya sehingga mereka dalam memilih tidak akan mempertimbangkan kinerja partai hasil pemilu yang lalu. Hal ini dikarenakan munculnya rasa kekecewaan akan kinerja partai politik yang ada pada pemilu sebelumnya. aspek orientasi evaluatif, nelayan tetap akan menyalurkan hak politiknya di pemilihan umum tetapi keputusan mereka didasarkan oleh keputusan untuk kenyamanan dan keamanan mereka untuk tinggal di lahan sewaan atau pinjaman para tuan tanah yang juga mengarahkan nelayan untuk memilih kandidat yang tuan tanah inginkan. Keputusan memilih juga didasari oleh maraknya politik uang oleh para kandidat.

**Kata Kunci:**  
Afektif;  
Evaluatif;  
Kognitif;  
Rasional.

**Abstract:** *This study aims to determine and analyze the political orientation of the fishing communities in Majene Regency which is also associated with their rationality in voting in elections. This research was conducted in Majene Regency, West Sulawesi Province, using qualitative research type with descriptive type of analysis. Determination of informants was conducted purposively. Data was obtained through in-depth interviews and literature review. Data was analyzed using political orientation theory, rational choice theory, Coleman and other rationality concepts. The results showed that cognitive orientation, fishermen's knowledge of the general election was still very low. In making political decisions, they do not consider the program and vision and mission of the political parties but only consider the figures they know and like. In the affective orientation aspect, fishermen do not feel that the results of the previous elections can benefit their lives so that they will not consider the results of the party's performance. last election. This is due to the emergence of disappointment at the performance of political parties in the previous election. aspects of evaluative orientation, fishermen will still distribute their political rights in elections but their decisions are based on decisions for their comfort and security to live in rented land or loans from landlords who also direct fishermen to choose the candidate that the landlord wants. The decision to vote was also based on the rise of money politics by the candidates.*

**Keywords:**  
*Affective;  
Evaluative;  
Cognitive;  
Rational.*

**How to cite:**

Irwansyah Mansur., et al. (2019). Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan pada Pemilihan Umum di Kabupaten Majene. *The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 5(1), 1-13.



Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA-4.0

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum yang merupakan sarana legal dalam pergantian kekuasaan. Pemilihan umum juga merupakan ruang evaluasi atas kinerja kepemimpinan selama lima tahunan oleh masyarakat. Dalam tataran praktisnya, pemilu untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari legislatif maupun di eksekutif.

Keikutsertaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dapat terlihat dari lima pendekatan yakni pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.<sup>1</sup> Pendekatan struktural akan melihat kegiatan memilih sebagai produk dengan konteks yang luas seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh partai politik. Pendekatan sosial cenderung menempatkan pemilih pada konteks sosial seperti pemilih memilih karena status sosialnya, ekonomi, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, agama dan pendidikan. Pendekatan ekologis cenderung menilai karakteristik pemilih memilih dikarenakan faktor teritorial seperti desa, kecamatan, kabupaten, propinsi bahkan negara. Pendekatan psikologi sosial yakni pemilih dalam menentukan pilihannya dikarenakan ada keterikatan emosional pemilih dengan partai tertentu. Dan

<sup>1</sup>Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, hlm. 145.

pendekatan rasional yang mana pemilih memilih dikarenakan pertimbangan untung-rugi. Pemilih akan melakukan pertimbangan tertentu mengenai keuntungan yang diperoleh dalam memilih partai atau kandidat tertentu sehingga akan mempengaruhi keputusan memilih atau tidak dalam pemilu.

Pilihan rasional melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi antara untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada. Pemilih di dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup.<sup>2</sup> Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (*self interest*) maupun untuk kepentingan umum.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi sorotan selama ini adalah partisipasi pemilih untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak suaranya di bilik suara. Legitimasi pemilu sering sekali dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam memilih. Semakin tinggi tingkat partisipasi maka legitimasi hasil pemilu dianggap kuat dan begitu pula sebaliknya.

Masyarakat Kabupaten Majene merupakan masyarakat pesisir yang sebagian besar bertempat tinggal di daerah pesisir pantai. Karakteristik kehidupan pesisir ini membuat masyarakat Kabupaten Majene banyak yang menggantungkan kehidupannya dengan berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat pesisir ini hanya mempunyai keterampilan dalam penangkapan ikan sehingga nelayan adalah profesi satu-satunya yang dijadikan ladang pencarian nafkah keluarga mereka.

Secara geografis, masyarakat pesisir atau nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Secara sosiologis, mereka memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan masyarakat lainnya, karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan secara ekonomi masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumber daya perikanan baik perikanan tangkap di laut maupun budidaya, yang hingga saat ini aksesnya masih bersifat terbuka (*open access*), sehingga kondisi lingkungan wilayah pesisir dan laut menentukan keberlanjutan kondisi sosial ekonomi mereka.

Masyarakat nelayan hampir pasti isu yang selalu muncul adalah masyarakat yang marjinal, miskin dan menjadi sasaran eksploitasi penguasa baik secara ekonomi

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 146.

maupun politik. Kemiskinan yang selalu menjadi trade mark bagi nelayan dalam beberapa hal dapat dibenarkan dengan beberapa fakta seperti kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang datang. Disamping itu, kemiskinan mereka juga diakibatkan oleh masalah kerusakan ekosistem pesisir-laut yang berdampak serius terhadap menipisnya sumber daya perikanan.

Selain masalah sosial-ekonomi, kondisi lingkungan wilayah pesisir dan sistem mata pencaharian nelayan juga berdampak pada persoalan pendidikan dan sosial-keagamaan, terutama pendidikan keagamaan masyarakatnya. Sistem mata pencaharian masyarakat nelayan yang mengharuskan mereka berada di tengah laut untuk jangka waktu yang cukup lama, memaksa mereka untuk meninggalkan aktifitas lain selain 'melaut', termasuk aktifitas pendidikan dan sosial keagamaan. Para nelayan biasanya mengajak anak-anak mereka untuk melaut, padahal anak-anak mereka termasuk anak usia sekolah. Akibatnya, tentu saja, hak pendidikan mereka tidak terpenuhi secara maksimal. Bahkan hanya untuk memenuhi target wajib belajar sembilan tahun, program pemerintah. Inilah salah satu argumentasi yang mendasari mengapa pendidikan masyarakat nelayan rendah. Begitupun dalam melakukan aktifitas keagamaan, mereka memiliki kesempatan yang sangat terbatas. Imbasnya, pengalaman keagamaan dan pendidikan keagamaan mereka menjadi kurang memadai.

Kondisi kesejahteraan yang rendah memungkinkan politik transaksional dapat terjadi di masyarakat nelayan Majene. Hal ini bisa dilakukan oleh para peserta pemilu untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat nelayan untuk memilih mereka atau calon tertentu dalam pemilu. Bagi peserta pemilu, politik uang adalah konsekuensi logis dalam mendanai proses politik mereka. Mereka tahu bahwa politik uang adalah larangan namun mereka berkilah bahwa hal tersebut adalah biaya politik yang harus dikeluarkan. Masyarakat nelayan pun merasa bahwa uang yang mereka dapatkan sebelum hari pencoblosan adalah hal yang lumrah sebagai pemberian calon yang sering terjadi dari pemilu ke pemilu.

Peserta pemilu dalam melakukan politik uang dengan merekrut para juragan sebagai tim pemenang mereka dalam pemilu. Keterlibatan para juragan ini dianggap penting bagi para elit dikarenakan mereka dianggap sebagai alat meraup suara yang efektif di masyarakat nelayan. Mereka dianggap memiliki kekuasaan akan profesi para sawi atau anak buah mereka sebagai nelayan. Model pendekatan ini menjadi pilihan yang peserta pemilu anggap efektif dalam setiap pemilihan umum bahkan sampai di tingkat pemilihan kepala kampung di lingkungan nelayan.

Dari fenomena sosial dan politik tersebut yang peneliti dapatkan dalam observasi awal ternyata mempunyai hubungan terhadap partisipasi pemilih di TPS-TPS lingkungan nelayan menetap. Partisipasi mereka sangatlah tinggi dan ini terjadi dari pemilu ke pemilu. Nelayan akan memilih untuk mengikuti dan berpartisipasi

dalam momen pemilihan umum daripada mereka melaut untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Hal ini menarik dikarenakan mereka merasa bahwa bantuan kandidat yang menjadi peserta pemilihan umum yang telah duduk dalam jabatan politik belum dirasakan membantu mengangkat kesejahteraan mereka namun mereka tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Penelitian ini akan mengaitkan dengan orientasi politik dari baik orientasi kognitif sekitar akurat atau tidaknya pengetahuan individu tentang sistem politik yang mencakup beberapa unsur, seperti kesadaran politik ataupun orientasi afektif dari masyarakat yaitu orientasi-orientasi perasaan terhadap politik, atau dengan kata lain, perasaan menerima atau menolak hal-hal yang bersifat politik sehingga dapat mempengaruhi sikap politik masyarakat nelayan di Kabupaten Majene. Dari uraian di atas maka penulis akan mengajukan penelitian dengan judul “Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Majene” yang mana penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran baik kepada penyelenggara pemilu sebagai sarana sosialisasi pemilu maupun bagi peserta pemilu baik nasional maupun lokal dalam pelaksanaan pendidikan politik di masyarakat.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan sosial politik masyarakat nelayan akan pilihan politiknya, yang akhirnya diurai secara mendalam dengan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti akan menjelaskan keadaan situasi yang ada secara utuh, meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*), yang berinteraksi secara sinergis dengan objek yang diteliti. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yakni kawasan perkampungan nelayan di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian tentang rasionalitas orientasi politik masyarakat nelayan pada pemilihan umum di Kabupaten Majene. Peneliti akan menjabarkan orientasi politik masyarakat nelayan dalam tiga aspek yakni aspek orientasi kognitif, aspek orientasi afektif dan aspek orientasi evaluatif.

## **Orientasi Politik Masyarakat Nelayan di Kabupaten Majene**

Masyarakat nelayan dengan latar belakang kehidupannya banyak mendapatkan sorotan dalam politik lokal. Kehidupan nelayan dalam sektor ekonomi, latar belakang pendidikan, relasi patronase antara juragan dan *sawi* dan latar belakang lainnya dapat mempengaruhi keputusan politik mereka. Hal ini akan menjadi perhatian dari berbagai elemen pemilihan umum baik dari pihak penyelenggara maupun dari pihak peserta pemilu bahwa masyarakat nelayan merupakan objek vital dalam keberlangsungan dinamika politik di Kabupaten Majene.

Dari hal tersebut peneliti melakukan pendalaman untuk orientasi politik masyarakat nelayan yang mana orientasi politik ini mempengaruhi nelayan dalam menentukan keputusan politik mereka. Dalam orientasi ini, penulis membagi dalam tiga orientasi yakni orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif.

### **Orientasi Kognitif**

Dalam pembentukan orientasi kognitif masyarakat nelayan, yang paling berperan adalah Partai politik dengan melakukan pekerjaan nyata di masyarakat. Partai politik harus hadir sebagai pemberi solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Partai politik dalam melakukan sosialisasi tidaklah dilakukan dengan proses program yang berkala di masyarakat tetapi dengan cara partai politik menjadi fasilitator akan kebutuhan masyarakat untuk dapat disampaikan kepada pemerintah daerah.

Para partai politik berlomba dalam hal kerja nyata ini guna mendapatkan penilaian dari masyarakat sehingga mendapat dukungan nantinya dalam pemilihan umum. Ketika partai politik telah memperlihatkan kerja nyatanya di masyarakat sudah merupakan bagian pendidikan politik mereka ke masyarakat nelayan. Dengan banyaknya frekuensi partai politik dalam melakukan pendampingan tersebut diharapkan akan berbanding lurus dengan keyakinan masyarakat akan partai tersebut dan menjadi pilihan mereka dalam pemilu berikutnya. Hal ini sesuai dengan pandangan Firmanzah tentang pandangan kognitif bahwa masyarakat akan menilai dan kemudian memilih partai politik yang program kerjanya paling rasional dan logis. Partai politik melihat bahwa masyarakat adalah entitas yang rasional dan bisa berfikir sehingga partai politik akan mengimplementasikan program kerja yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Upaya yang dilakukan partai politik ini untuk mengarahkan perspektif dari nelayan tentang partai politik tersebut. Partai berusaha menunjukkan bahwa mereka bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat sehingga rakyat memiliki pandangan dan pengetahuan bagaimana fungsi partai politik dalam memperjuangkan kepentingan dari rakyat tersebut. Menurut Firmanzah, dengan kerja ini partai akan mendapat penilaian dari rakyat dan akan menjadi pilihan dalam pemilihan umum.

Dalam pembentukan pengetahuan masyarakat nelayan ini, penulis membandingkannya dengan pengetahuan nelayan tersebut kepada nelayan itu sendiri. Apakah nelayan telah mengetahui dan mengerti tentang informasi politik sehingga informasi tersebut menjadi acuan nelayan dalam menentukan pilihan politiknya? Pertanyaan tersebut penulis menanyakan langsung ke nelayan yang tinggal di pesisir pantai Kabupaten Majene.

Dari hasil penelitian tersebut dapat tergambar bahwa kepercayaan serta pengetahuan nelayan terhadap politik sangatlah kurang. Mereka tidak bisa memaknai pemilu sebagai sistem demokrasi yang juga merupakan hak dan kewajiban mereka selaku warga Negara. Dari konsep orientasi kognitif dari Almond dan Verba dapat diartikan bahwa Masyarakat Nelayan Majene secara kognitif, orientasi politiknya rendah. Masyarakat nelayan menganggap pemilihan umum hanyalah sekedar memilih figur yang mereka senangi tanpa melihat program dan visi misi yang calon dan partainya bawa. Masyarakat tidaklah melihat partai politik merupakan salah satu unsur dalam sistem politik dalam pemilihan umum. keberadaan partai politik sebagai alat atau kendaraan dari kandidat legislatif bukanlah menjadi pertimbangan mereka dalam membuat keputusan politik sehingga masyarakat nelayan dalam mengambil keputusan politiknya terkesan hanya sebagai memilih tokoh yang mereka senangi saja tanpa memperhatikan kebijakan atau symbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik secara keseluruhan seperti yang Almond dan Verba maksud.

Demikian juga dengan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang mana para nelayan sebagai individu sangat rendah dalam pemahamannya. Almond dan Verba mengungkapkan bahwa dalam memilih, individu mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara di dalam konstitusi. Hal ini yang kurang dimaknai oleh para nelayan dalam berpelelu. Mereka tidak memaknai pemilihan umum sebagai sarana demokrasi dalam menyalurkan hak demokrasi mereka. Mereka mengikuti pemilu tanpa faham apa fungsi pemilu untuk kehidupan mereka. Dari hal tersebut, keputusan memilih dari nelayan bukanlah lahir dari pengetahuan politik mereka tetapi cenderung untuk memilih orang sebagai sosok yang disenangi tanpa pertimbangan program serta kebijakan sistem yang melatarbelakangi kandidat tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Almond dan Verba bahwa individu dalam memilih harus mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut.

### **Orientasi Afektif**

Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang kehidupan kesehariannya tidak lepas dari berbagai permasalahan baik itu permasalahan yang menyangkut aktifitasnya sebagai nelayan maupun sebagai pribadi individu yang harus memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya. Segala bentuk permasalahan ini akan memberikan kesan kepada diri mereka untuk merasakan secara emosional terhadap pilihan politik yang pernah mereka laksanakan pada waktu pemilu terdahulu. Segala bentuk interaksi pihak yang menjadi pilihannya akan direspon dengan memberikan

kesan yang secara emosional terhadap figur yang dipilihnya atau pilihan yang bukan pilihannya.

Perasaan positif dan negatif yang timbul dalam diri dapat menentukan orientasi politiknya. Dengan munculnya perasaan positif pada diri masyarakat maka akan menimbulkan “rasa percaya” (*trust*) dan sebaliknya jika perasaan negatif yang muncul maka akan menimbulkan rasa “permusuhan” (*hostility*). Almond dan Powell mencatat bahwa aspek penting yang menentukan orientasi politik seseorang, adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (*trust*) dan “permusuhan” (*hostility*).

Nelayan sebagai individu akan muncul rasa percayanya jika janji yang pernah diucapkan oleh kandidat sebelum terpilih dan mereka anggap sebagai hal yang dapat membantu mereka dalam beraktifitas sebagai nelayan itu terpenuhi. Rasa percaya itu juga akan muncul jika interaksi para anggota dewan ini tetap terjalin dengan mereka walaupun bukan dimasa menjelang pemilihan umum saja. Namun sebagian nelayan kurang dapat lagi percaya dengan para kandidat yang ada dikarenakan pengalaman yang mereka dapatkan selama kandidat ini terpilih di pemilu sebelumnya. Kesan yang mereka dapatkan adalah kesan yang bernilai negatif sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan lagi terhadap sebagian kandidat tersebut. Rasa percaya yang kurang ini berujung pada rasa permusuhan seperti yang dimaksud oleh Verba dan Powell terhadap mereka para kandidat sehingga apapun yang kandidat dimaksud bawa sebagai program tidaklah dapat mempengaruhi pilihan para nelayan.

### **Orientasi Evaluatif**

Dalam hal orientasi evaluatif para nelayan di Kabupaten Majene dari keputusan mereka tidak lagi melihat program yang dibawa oleh para kandidat atau visi dan misi partai politik. Mereka akan lebih cenderung memilih karena figur yang mereka senangi tanpa ada penilaian terhadap partai politik yang menjadi kendaraan politik figur tersebut. Keputusan memilih juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang nelayan rasakan dari pemilu sebelumnya yang mana pengalaman tersebut akan menimbulkan rasa percaya terhadap kandidat atau rasa permusuhan terhadap kandidat tersebut. Jika figur tersebut dinilai member kesan positif, maka mereka para nelayan akan percaya dan memilih lagi. Tetapi jika muncul rasa tidak suka atau permusuhan maka tidak akan dipilih lagi.

Selain karena dampak orientasi Kognitif dan Afektif, Keputusan memilih juga ternyata dipengaruhi oleh kehidupan nelayan yang bertempat tinggal di lahan yang bukan miliknya. Keputusan politik yang mereka ambil bagi nelayan yang bertempat tinggal di lahan pinjaman atau sewaan sangat dipengaruhi oleh sikap dari pemilik lahan tersebut.

Fakta lain adalah maraknya politik uang. Praktik politik uang di kalangan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Majene itu sangatlah marak terjadi. Fakta ini terus berlangsung pada setiap momen pemilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Majene

baik itu Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah. Praktik politik uang ini menjadi pendorong peningkatan partisipasi para nelayan dalam pemilihan umum. padahal praktik politik uang merupakan pelanggaran aturan pemilihan umum yang sanksinya cukup berat. Fakta lain adalah keputusan pilihan politik nelayan dikarenakan upaya nelayan dalam mempertahankan keamanan hidupnya yang tinggal di lahan pinjaman dari para tuan tanah. Ketika mereka ingin aman tinggal maka mereka harus membuat keputusan politik sesuai dari arahan si tuan tanah atau mereka terancam untuk terusir dari tanah yang mereka tinggali.

Nelayan dalam memilih dikarenakan menerima imbalan adalah suatu bentuk rasionalitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Boudon bahwa setiap keputusan pasti ada yang mendasari. Rasionalitas pemilih tidak dapat diukur dengan kesesuaian terhadap standar normatif yang berkembang di masyarakat. Benar atau salah keputusan tersebut ditentukan dengan seberapa jauh hal tersebut sesuai dengan nilai dasar dan tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing individu. Ketika standar normatif menerima imbalan untuk memberikan adalah suatu kekeliruan dan menyimpang tetap dikatakan bahwa pilihan itu rasional. Pilihan-pilihan yang menjadi keputusan nelayan adalah keputusan untuk memenuhi kebutuhan mereka walaupun pemenuhan kebutuhan itu hanyalah sesaat sewaktu hari pencoblosan saja.

Dari pembahasan data tersebut, dapat dianalisa hasil dari penelitian sebagai berikut:

- a. Budaya politik Masyarakat Nelayan di Kabupaten Majene, Kaitan dengan budaya politik Almond dan Verba, pada umumnya kecenderungan budaya politik masih tergolong Budaya politik parokial memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang rendah terhadap sistem politiknya, ini dapat dilihat dari perhatian masyarakat nelayan Kabupaten Majene intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (output) sangat rendah. Subjek individual belum menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri bahwa perasaan akan hasil pemilihan umum belum memberikan manfaat yang dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. posisinya sebagai warga Negara yang memiliki hak demokrasi dalam posisi yang pasif, diyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Jika melihat ciri budaya politik menurut Almond dan verba, semakin menguatkan identitas masyarakat nelayan di Kabupaten Majene adalah menganut budaya parokial. Masyarakat nelayan Kabupaten Majene hidup di suasana yang tradisional dengan pola hidup yang sederhana. Kehidupan mereka hanyalah diwarnai dengan komunikasi dan interaksi sesama nelayan mengenai aktifitas mereka sebagai nelayan. Dengan pernyataan-pernyataan mereka sebagai informan dalam wawancara menyatakan bahwa mereka tidaklah menaruh minat yang banyak terhadap dinamika politik yang terjadi. Ini dikarenakan ternyata dari pemilu ke pemilu tidaklah memberikan banyak perubahan terhadap kehidupan

mereka. Pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan ini membawa nelayan pada posisi pasif dalam berdemokrasi walaupun mereka tetap ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

- b. Rasionalitas jika dikaitkan dengan orientasi politik yang mendukung pengetahuan para nelayan dapat dikaji dari sumber daya sosial yang dimiliki para nelayan. Sumber daya sosial yang dimiliki oleh para nelayan sangatlah terbatas dalam kehidupan kesehariannya. Mereka hidup dengan tingkat pendidikan yang rendah, penghasilan untuk menafkahi keluarga mereka terbatas, dan mereka hidup di tanah yang bukan milik mereka sendiri. Coleman mengungkapkan bahwa sumber daya yang dimiliki aktor akan memberikan pengaruh dalam pencapaian tujuannya. Semakin besar sumber dayanya maka akan cenderung semakin mudah pencapaian tujuan. Nelayan sebagai aktor yang disebutkan oleh Coleman, tentunya akan memiliki tujuan dan mempunyai nilai dasar untuk melakukan pilihan dengan melakukan pertimbangan yang mendalam untuk pencapaian kebutuhan yang diinginkannya. Mereka akan berupaya melakukan pilihan-pilihan yang mereka anggap sebagai pilihan terbaik untuk pencapaian tujuannya. Pencapaian tujuan haruslah diikuti dengan sumber daya yang baik karena menurut Coleman, sumber daya adalah kontrol dalam pencapaian tujuan. Ketika para nelayan membuat keputusan terhadap pilihannya dengan harapan akan membawa perubahan sumber daya yang dimilikinya maka pilihan tersebut rasional.
- c. Setelah membahas mengenai orientasi politik yang bermuara kepada budaya politik masyarakat nelayan di Kabupaten Majene kemudian membahas tentang sumber daya sosial nelayan maka pada pembahasan saat ini adalah tentang pilihan rasional dalam pengambilan keputusan politik nelayan dalam pemilihan umum di Kabupaten Majene. Nelayan sebagai warga Negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum haruslah mempunyai kedaulatan dalam penyaluran hak demokrasi. Dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbedabeda, mereka mempunyai hak yang sama dengan segmen pemilih lainnya.

Dalam pengambilan keputusan politik, masyarakat nelayan tidak lagi memikirkan apa yang menjadi tujuan pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Segala aspek yang bersifat norma dan etika bukanlah menjadi dasar dalam pilihan politik mereka. Mereka mengambil keputusan berdasarkan apa yang menjadi tujuan individu mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Weber bahwa rasionalitas seperti ini adalah rasionalitas tujuan yang mana aksi tersebut hanya dilakukan dengan pertimbangan tujuan individu tanpa mempertimbangkan etika, moralitas agama dan hal-hal yang bersifat estetika. Rasionalitas yang dijalani oleh para nelayan yakni rasionalitas yang tidak lagi didasari oleh nilai yang dikemukakan oleh Weber yang meliputi etika, moralitas, agama dan hal-hal yang bersifat estetika. Politik uang yang terjadi di masyarakat nelayan dijadikan sebagian nelayan untuk menjadi alasan pengambilan sikap politik merupakan hal yang sangat tidak pantas dalam etika dan moralitas pemilih dalam pemilihan umum tetapi hal tersebut mereka menerima

imbalance politik sebagai tujuan untuk suatu keuntungan pada saat itu saja dikarenakan mereka menilai bahwa dimasa yang akan datang tidaklah pasti hasil pemilu itu dapat memberikan keuntungan bagi mereka.

Dari penjabaran di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kecenderungan Budaya politik masyarakat nelayan dalam pemilihan umum adalah budaya parokial yang pasif terhadap makna pemilihan umum dan dalam pengambilan keputusan politiknya hanya mempertimbangkan keuntungan sesaat saja dikarenakan munculnya sikap tidak suka terhadap hasil pemilu dikarenakan pengalaman dari pemilu-pemilu yang lalu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: Orientasi Kognitif Masyarakat nelayan Kabupaten Majene memiliki kecenderungan pengetahuan sangatlah minim. Mereka tidak dapat menangkap visi dan misi serta program yang dibawa oleh partai politik peserta pemilihan umum. Mereka memaknai pemilihan umum hanyalah kegiatan rutin biasa tanpa banyak mengerti manfaat bagi mereka. Dari orientasi afektifnya, para nelayan di Kabupaten Majene merasa bahwa pemilu tidaklah membawa perubahan dari kehidupan mereka. Segala janji yang mereka pernah terima dalam penyelenggaraan pemilihan umum dari peserta ternyata kurang yang terbukti sehingga menimbulkan rasa tidak percaya lagi terhadap hasil pemilihan umum. orientasi evaluatifnya yakni mereka akan tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum tetapi bukan didorong oleh sikap kognitif dan afektifnya tetapi setiap hari pencoblosan pada penyelenggaraan pemilu mereka dilarang untuk melaut oleh pemerintah daerah untuk member kesempatan mereka berpartisipasi dalam pemilihan umum. nelayan dalam mengambil keputusan memilih mereka lebih mempertimbangkan keamanan hidup mereka tinggal di lahan pinjaman dan juga karena maraknya politik uang atau *Money Politic*. Budaya politik yang masyarakat nelayan Kabupaten Majene anut yakni Budaya Politik Parokial. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan akan pemilihan umum. mereka tidaklah menaruh minat yang banyak terhadap dinamika politik karena mereka merasa kurang mendapat manfaat dari pemilihan umum tersebut. Rasionalitas pilihan politik mereka cenderung dikarenakan pilihan untung dan rugi dalam ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. hal yang banyak ditemukan adalah mereka memilih dikarenakan adanya *Money Politic* atau imbalan yang mereka terima dari peserta pemilu. Kecenderungan berikutnya mereka memilih dikarenakan keberlangsungan kehidupan mereka yang bertempat tinggal di lahan pinjaman sehingga mereka harus mengikuti arahan pemilik lahan dalam pengambilan keputusan politiknya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pemilihan umum.

## REFERENSI

- Andika Mei Mulyana. (2016). "Peran Pemilihan Umum Raya dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa". *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan.
- Ester Krisnawati. (2014). Media Kreatif sebagai Sikap Politik Pemuda Indonesia. Dalam *Proceeding Conference on Communication, Culture, and Media Studies*, Program Studi Ilmu Komunikasi, UII, 944-953.
- F. Firmanzah. (2008). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gabriel A. Almond & Sidney Verba. (1990). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi Lima Negara* (Terj. oleh Sahat Simamora). Jakarta: PT. Bina Aksara.
- George Ritzer & Douglas J. Goodman. (2008). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Teori Sosial Postmodern* (Terj. oleh N. Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Jack C. Plano., et al. (1985). *Kamus Analisa Politik* (Terj. oleh Edi R. Siregar). Jakarta: Rajawali Pers.
- Jalaluddin Rakhmat. (1992). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- James S. Coleman. (2010). *Teori Pilihan Rasional* (Terj. oleh Nono Warsono). Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.
- Joko J. Prihatmoko. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- K. Khoirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi (Eds.). (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Mega Mediastutie. (2006). "Orientasi Politik Mahasiswa dalam Pilkada Kota Bandar Lampung". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Michael Rush & Phillip Althoff. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik* (Terj. oleh Kartini Kartono). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazaruddin Sjamsuddin. (1993). *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.). (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Rizanul Ihsan. (2015). "Rasionalitas Masyarakat Kepulauan dalam Memilih Pemimpin: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Roderick Martin. (1990). *Sosiologi Kekuasaan* (Terj. oleh Herry Yudiono). Jakarta: Rajawali Pers.
- Saifuddin Azwar. (2000). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Sanapiah Faisal. (1990). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: PT. Usaha-Usaha Nasional.
- Sapto Supono. (2005). Peranan Pemerintah dalam Pilkada dan Potensi Permasalahan Pilkada. Makalah dipresentasikan pada *Seminar Nasional Dilema-Dilema Pilkada Langsung*, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik, Universitas Diponegoro, di Semarang.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkap Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Rusmi Widayatun. (1999). *Ilmu Perilaku M.A. 104*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Yesmil Anawar & A. Adang. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.